

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta, Jakarta Raya) adalah Ibukota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Jakarta terletak di bagian Barat Laut Pulau Jawa. Banyaknya penduduk membuat daerah ibukota Jakarta menjadi semakin padat. Pemukiman kumuh terjadi disetiap sudut kota. Banyaknya pengamen, pemulung, pengemis juga membuat kota Jakarta semakin terlihat kumuh. Di samping itu banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berada di pinggir jalan atau trotoar di berbagai tempat, dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu setiap orang yang melintas, membuat kota Jakarta terlihat tidak bersih dan nyaman.

Berdasarkan sensus penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Jakarta berjumlah 9.607,787 jiwa. Dan sampai saat ini (tahun 2011) belum di ketahui berapa banyak penduduk yang bertambah lagi memenuhi kota Jakarta. Setiap tahunnya, penduduk yang datang dari berbagai daerah ke Jakarta bertujuan untuk mencari rezeki. Karena di ketahui Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan juga merupakan pusat bisnis dan keuangan. Tetapi tidak semua

pendatang baru berhasil hidup di kota besar seperti Jakarta dengan status ekonomi lebih baik, hal itu dikarenakan kurangnya pendidikan dan keahlian yang ada pada sebagian dari mereka, karena hal itu pula menjadikan mereka justru lebih memilih untuk mengemis, memulung, mengamen, dan berdagang kaki lima demi dapat bertahan hidup.

Semakin hari banyak bermunculan pasar-pasar tradisional yang berada di sekitar Jakarta. Pasar-pasar tersebut yang sering kali tidak memiliki lahan khusus dan berada di pinggiran jalan dan trotoar, membuat kemacetan lalu lintas kerap kali terjadi. Sehingga jika di lihat dengan kasat mata maka akan terlihat keadaan pasar yang semraut dan tidak beraturan.

Melihat masalah itu, pemerintah kota (pemkot) melalui Humas dan petugas Satpol PP bekerja sama merelokasi dan melakukan penertiban ke pedagang kaki lima agar mau di pindahkan dan memiliki tempat berjualan sehingga tidak menyebabkan kemacetan serta tidak mengganggu pengguna jalan dan menjadikan kota yang rapi dan bersih.

Seringnya terjadi keributan dan kerusuhan saat diadakan penertiban kesejumlah pedagang kaki lima salah satunya di sebabkan oleh kurangnya komunikasi, negosiasi serta sosialisasi kepada para pedagang kaki lima dalam hal pemindahan.

Pasar Minggu adalah salah satu pasar yang terletak di Jakarta Selatan dan merupakan pasar yang sering kali di lakukan penertiban untuk pedagang kaki

limanya. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu dan trotoar jalan membuat pengguna kendaraan maupun pejalan kaki sangat terganggu.

Walikota Jakarta Selatan, H Syahrul Effendi (2011) pun sudah meminta seluruh PKL Pasar Minggu yang menempati jalan umum atau bahu jalan agar memanfaatkan penampungan lokasi binaan (lokbin) yang telah disediakan pemerintah daerah secara resmi di kawasan itu.

Seringnya di lakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dari pihak Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Humas dan Satpol PP, tidak membuat pedagang kaki lima berhenti berjualan atau berpindah lokasi berjualan, pada kenyataannya pedagang kaki lima tetap datang dan berjualan lagi ketika pihak Humas dan Satpol PP sudah pergi atau se usai dilakukan penertiban.

1.2 Fokus Penelitian

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) idealnya disertai dengan komunikasi yang intens antara humas pemerintah kota (Pemkot) dan Satpol PP dengan pedagang kaki lima, sehingga terjadi keharmonisan dalam hubungan yang di bina dengan baik dan timbul saling pengertian. Namun realitanya penertiban sering diikuti dengan keributan yang merugikan pedagang. Bila hal ini terus berlangsung, citra pemerintah kota akan buruk dan pemerintah kota di

anggap gagal dalam mewujudkan ketertiban umum di wilayah perovinsi DKI Jakarta khususnya Pasar Minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin tahu bagaimana sebenarnya strategi negosiasi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan pedagang kaki lima di wilayah (Pasar Minggu) dalam masalah penertiban. Dari persoalan itu, maka judul yang diambil adalah “BAGAIMANA STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH PASAR MINGGU?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses dari masing-masing jenis dan bentuk negosiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui strategi dari masing-masing jenis dan bentuk negosiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan petugas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta wawasan terhadap perkembangan studi ilmu komunikasi dalam hubungannya dengan strategi negosiasi.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Pasar Minggu.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian kerangka teori, definisi, definisi konseptual, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian desain penelitian, bahan penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi uraian subjek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan atau uraian singkat mengenai penelitian dan saran-saran menjadi jawaban dari masalah.